



Seminar Nasional 80 Tahun Indonesia

Pemberdayaan Perempuan sebagai Pilar Demokrasi

Tim Gender LAB 45

Latar Belakang

Tujuan:

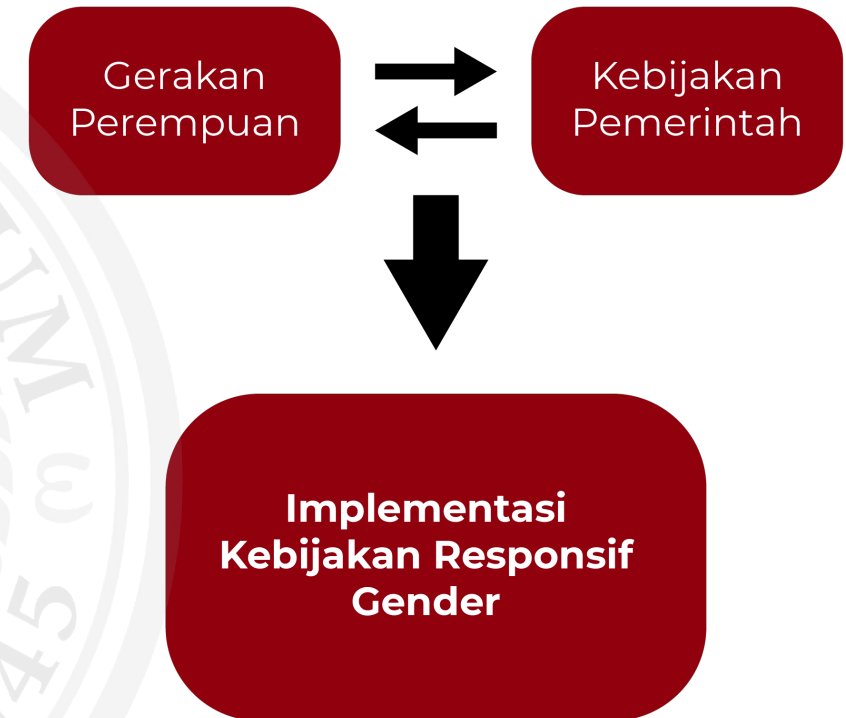
Menilik **progres pemberdayaan perempuan** oleh pemerintah di bidang **pendidikan, kesehatan, dan ekonomi**, untuk melihat sejauh mana Indonesia sudah menerapkan **demokrasi substantif** yang dampaknya dirasakan langsung oleh kelompok perempuan.

Kebijakan Responsif Gender

(Naila Kabeer dan Amy Mazur):

Tidak hanya sekadar mendorong partisipasi simbolik, tetapi juga dapat **meruntuhkan relasi kuasa** yang mengakar dan **merugikan kelompok perempuan** hingga saat ini.

Arus Implementasi Kebijakan Responsif Gender

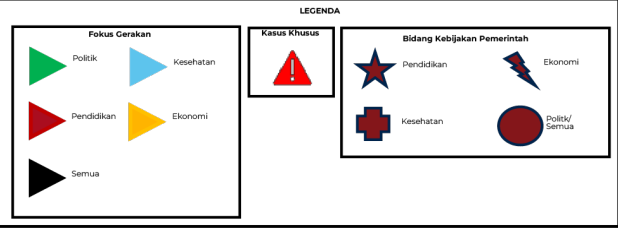


Gerakan perempuan akan selalu hadir untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang responsif gender, serta merespons kebijakan-kebijakan pemerintah yang meleset dari cita-cita para perempuan bangsa.

Klasifikasi Paradigma Pembangunan Berbasis Gender

Indikator	WID	WAD	GAD	GESI	GEDSI
Masalah	Keterlibatan perempuan kurang dalam perencanaan dan kebijakan	Dimensi kompleks kekuasaan dan relasi gender belum tersentuh	Hubungan sosial laki-laki dan perempuan tidak setara	Perempuan disabilitas masih menjadi objek pembangunan	Tidak ada masalah (utopia)
Identitas Perempuan	Universal	Universal	Dipengaruhi oleh ras, etnis, dan kelas	Dipengaruhi oleh ras, etnis, kelas, dan stigma sosial lainnya	Dipengaruhi oleh faktor disabilitas
Peran Perempuan	Objek pembangunan	Subjek pembangunan yang dipisahkan dari konteks sosial	Subjek pembangunan yang tidak dipisahkan dari konteks sosial	Kelompok perempuan rentan menjadi subjek pembangunan	Kelompok perempuan disabilitas juga menjadi subjek pembangunan
Bidang Pembangunan	Ekonomi	Ekonomi, sosial, dan politik	Ekonomi, sosial, politik dan berkelanjutan	Ekonomi, sosial, politik dan berkelanjutan dari kelompok perempuan rentan	Ekonomi, sosial, politik dan berkelanjutan dari kelompok perempuan disabilitas
Tujuan	Meningkatkan pendapatan perempuan, di samping meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengurus rumah tangga	Menyediakan akses bagi perempuan ke sektor produktif, di samping mendapatkan pemahaman politik	Memberdayakan perempuan dengan mengubah struktur dan institusi sosial menjadi responsif gender (PUG)	Memberdayakan kelompok perempuan rentan dengan mengubah struktur dan institusi sosial menjadi responsif gender (PUG)	Memberdayakan kelompok perempuan disabilitas dengan mengubah struktur dan institusi sosial menjadi responsif gender (PUG)

Gerakan Perempuan dan Kebijakan Pemerintah setelah Kemerdekaan



1945
Gerakan Perempuan Women's International Democratic Federation (WIDF)

Des 1945
Federasi Kowani terbentuk menyatukan Wani dan Perwani menjadi Perwari

9 Des 1947
Delegasi perempuan Indonesia ke konferensi Wanita Internasional di New Delhi

5 Jun 1950
Gerwani berdiri di Semarang

1960
Sidang Biro Gabungan Wanita Demokratis Sedunia di Jakarta

1982
Yayasan Annisa Swasti

1983
Konferensi Perempuan Dunia I di Nairobi

1985
Kalyanamitra

1987
Mamak melawan Indorayon di Sumatera Utara

Desember 1990
Solidaritas Perempuan

1991
Perempuan Adat Melawan PT. Freeport (Mama Yosepha Alomang)

1993
Women's Crisis Center (WCC)

1993
Perempuan Pulau Pari

1995
Konferensi Beijing tentang Perempuan

1995
LBH Apik

1995
Mitra Perempuan

1996
Yayasan Jurnal Perempuan

1997
Aliansi Perempuan Indonesia (API)

23 Feb 1998
Suara Ibu Peduli demo di Bundaran Hotel Indonesia atas lonjakan harga susu

Mei 1998
Kerusuhan Mei 1998: Pemerkosaan terhadap Perempuan

14-22 Des 1998
Kongres Perempuan Indonesia: Gerakan Afirmatif Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik

2000
KAPAL Perempuan

2001
Yayasan Kesehatan Perempuan

2002
Yayasan Pulih

2003
Perempuan Mahardhika

2004
JALA PRT

2004
Yayasan PEKKA

2004
Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan/KPS2K

2008
Lembaga Partisipasi Perempuan

2009
Aliansi Laki-laki Baru

2011
Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T)

2014
Gerakan Perempuan Kendeng

2015
Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual

2015
Perempuan Berkisah

Agustus 2016
Indonesian Feminist Lawyer Club

2016
Jaringan AKSI Remaja Perempuan

2019
Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist)

2020
Jaringan Masyarakat Sipil (JMS)

2021
Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PRT

2023
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan

1945-1967 - Soekarno

1945
Pendirian Sekolah Kepandaian Puteri (SKP)

1947
Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP)

1950
UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP)

1951
Pembentukan Maternal and Child Health Bureaus (Awal Mula Gagasan Puskesmas)

1958
UU Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

1964
Program Diversifikasi Pangan dan Kampanye Revolusi Menu

1967-1998 - Soeharto

1969
Program Transmigrasi dan Perempuan

1973
SD Inpres

1973
Program Koperasi Wanita dan KUD

1974
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1978
Kementerian Urusan Peranan Wanita; Dharma Wanita

1984
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW; Keputusan Mendagri No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1996
Gerakan Sayang Ibu

1997
Pengiriman tenaga kerja Wanita (TKW)

1998-1999 - BJ Habibie

1998
Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

1998
Penghapusan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK)

1999
UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999 tentang Desentralisasi Layanan Kesehatan

1999-2001 - Gus Dur

2000
Kementerian Urusan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan

2000
Inpres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 (Larangan Segala Bentuk Ekspresi Agama dan Adat Tionghoa di Tempat Publik)

2000
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

2001-2004 - Megawati

2003
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Partai Politik (Keterwakilan Perempuan 30%)

2004
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

2004
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PTPKILN), termasuk Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

2004-2014 - SBY

2005
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2007
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

2009
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi (Mengecualikan Larangan Aborsi bagi Perempuan Korban Pemerkosaan)

2010
Beasiswa Bidikmisi

2011
UU No. 19 Tahun 2011 Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

2011
SE Menteri Nomor SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

2012
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua dan daerah 3T

2013
Beasiswa untuk peserta didik miskin (BSM)

2014-2024 - Joko Widodo

2014
Permenkes No. 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes 1636/Menkes/Per/XII/2010 (Pelarangan Petugas Medis Sunat Perempuan)

2014
Program Indonesia Pintar

2014
PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

2015
PermenPPPA No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2019
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Menaikkan Usia Perkawinan anak)

2020
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2021
Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

2022
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2022
Inpres No. 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin

2024
UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

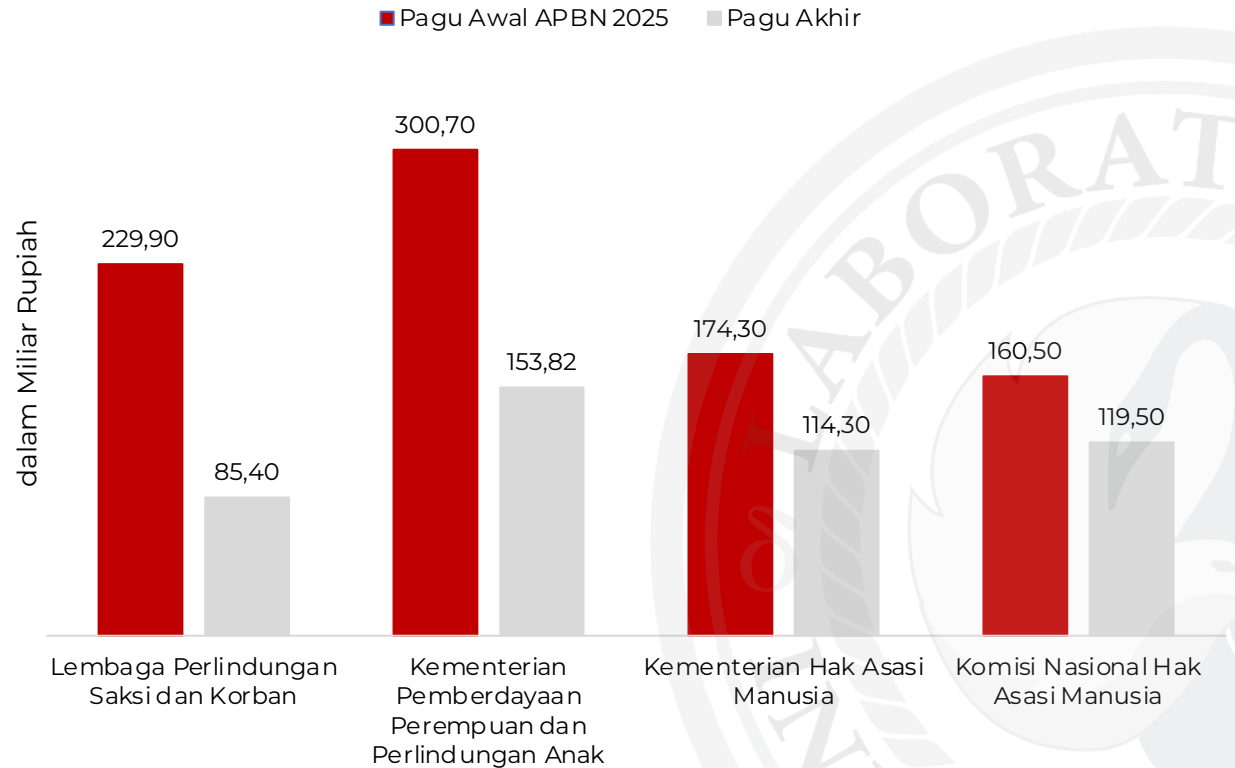
Sumber: Olahan Tim Peneliti.

GERAKAN PEREMPUAN

KEBIJAKAN NEGARA

Pemerintahan Prabowo Subianto

Pemotongan Anggaran terhadap K/L terkait Perempuan



Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Target-target RPJMN 2025-2029

Indeks Ketimpangan Gender
Turun dari 0,421 (2024) → 0,394 (2029)

Kesenjangan Upah Gender
Turun dari 22,09% → 17%

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Naik hingga 56,7-60,89%

Imunisasi HPV
Cakupan 90% & Pra-eliminasi Kanker Serviks di 125 Kab/kota

Angka Kematian Ibu
Turun dari 189/100.000 (2020) → 77 (2029)

Median Usia Kawin Pertama
Naik menjadi 22,8 tahun

Perkawinan Anak
Turun hingga 5,03%

Kekerasan Seksual
Turun hingga 3,19%

Pendidikan Perempuan
Minimal SMA 40,27% & Literasi Digital Naik 3,76

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari RPJMN V.

Pemerintahan Prabowo menaruh perhatian terhadap isu perempuan dalam **Asta Cita**. Target-target yang tertuang dalam **RPJMN**, serta pembentukan **Ruang Bersama Indonesia (RBI)** memang menjadi jawaban atas visi-misi tersebut. Namun, **pemotongan anggaran terhadap lembaga/Kementerian terkait pemberdayaan perempuan, efisiensi program MBG, dan ketidakjelasan pengesahan RUU PPRT**, kembali menjadi pertanyaan akan keseriusan pemerintah dalam mencapai target pemberdayaan perempuan dalam lima tahun ke depan. Gerakan-Gerakan akar rumput, seperti terlihat melalui aksi Indonesia Gelap (di dalamnya terdapat Aliansi Emak-emak), menjadi simbol menuntut adanya perubahan-perubahan dari sisi kebijakan yang lebih sesuai dengan target.

Indikator Pengukuran Utama

➤ Indikator Eksklusi Gender

Indikator	Penjelasan Singkat
Distribusi kekuasaan menurut gender	Penilaian terhadap apakah kekuasaan politik didistribusikan secara setara antara gender.
Kesetaraan kebebasan sipil berdasarkan gender	Penilaian terhadap apakah perempuan menikmati kebebasan sipil (akses ke keadilan, hak milik, kebebasan bergerak, dll) setara dengan laki-laki.
Akses ke layanan publik berdasarkan gender	Penilaian terhadap apakah akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan, air bersih didistribusikan secara setara.
Akses ke pekerjaan di sektor negara berdasarkan gender	Penilaian terhadap apakah pekerjaan di sektor pemerintahan tersedia setara bagi perempuan.
Akses ke peluang bisnis dari negara berdasarkan gender	Penilaian terhadap apakah perempuan bisa mendapatkan kontrak atau kerjasama dengan pemerintah secara adil.

Sumber: Olahan Tim Peneliti dari *V-Dem Institute*.

➤ Indikator Ketimpangan Gender dalam Empat Bidang

Bidang	Indikator	
	IKG	GII
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan/MTF Perempuan melahirkan anak pertama saat berusia kurang dari 20 tahun/MHPK20 	<ul style="list-style-type: none"> Angka kematian ibu/MMR Angka kelahiran remaja/ABR
Ekonomi	Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan	
Pendidikan	Pendidikan SMA ke Atas Laki-laki dan Perempuan	
Politik	Keterwakilan di legislatif Laki-laki dan Perempuan	

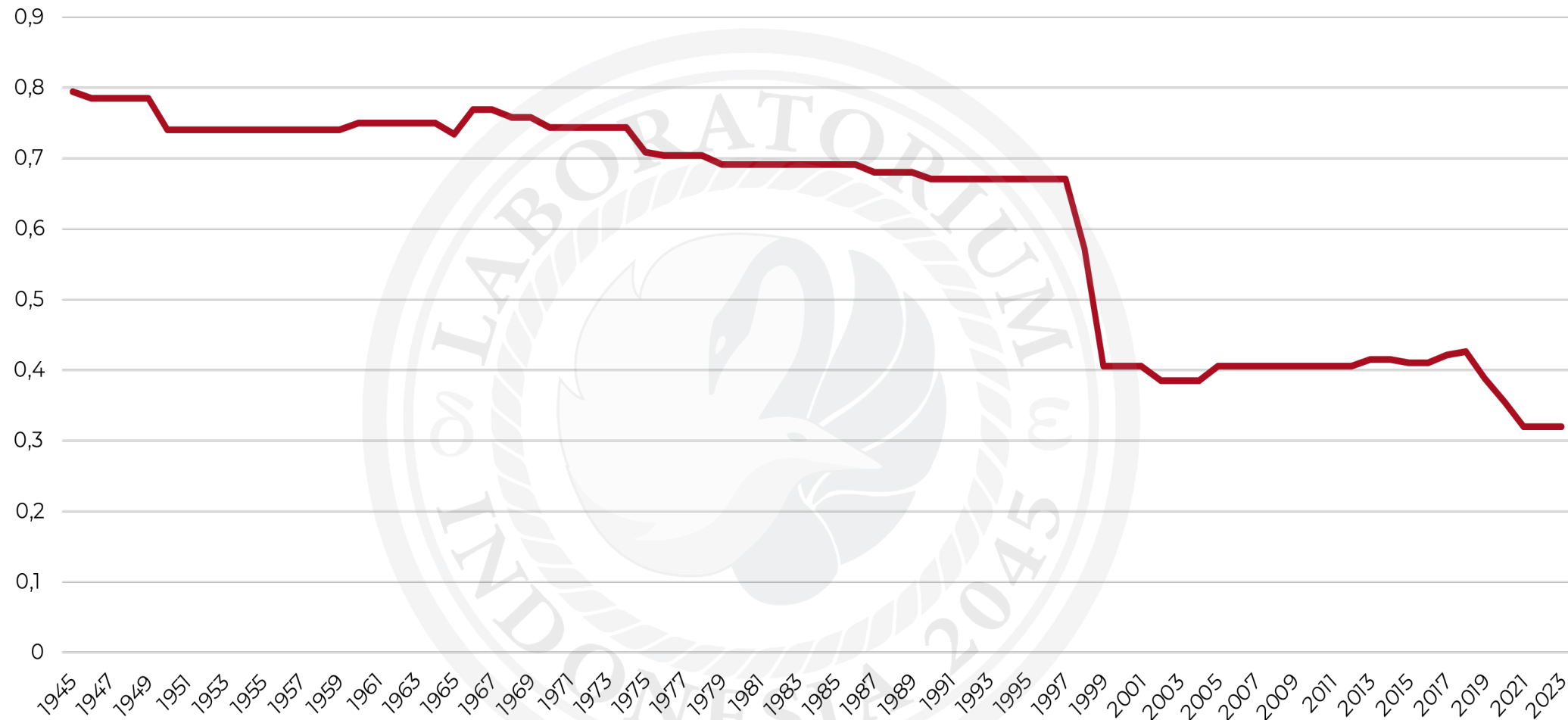
Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik.

Dua indikator utama dalam tulisan:

- *Exclusion by Gender Index* dari V-Dem berbicara soal aksesibilitas yang dirasakan oleh perempuan dari kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Semakin mendekati skor 0, maka tingkat eksklusi dari negara semakin rendah.
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan *Gender Inequality Index* (GII) dipakai guna melihat bagaimana pemerintah mengukur pemberdayaan perempuan, dan menyandingkannya dengan negara-negara global—terutama negara ASEAN dan Nordik. Semakin mendekati skor 0, maka tingkat ketimpangan semakin rendah.

Progres Positif Indonesia dalam Pengukuran Tingkat Eksklusi

Tren *Exclusion by Gender Index* Indonesia

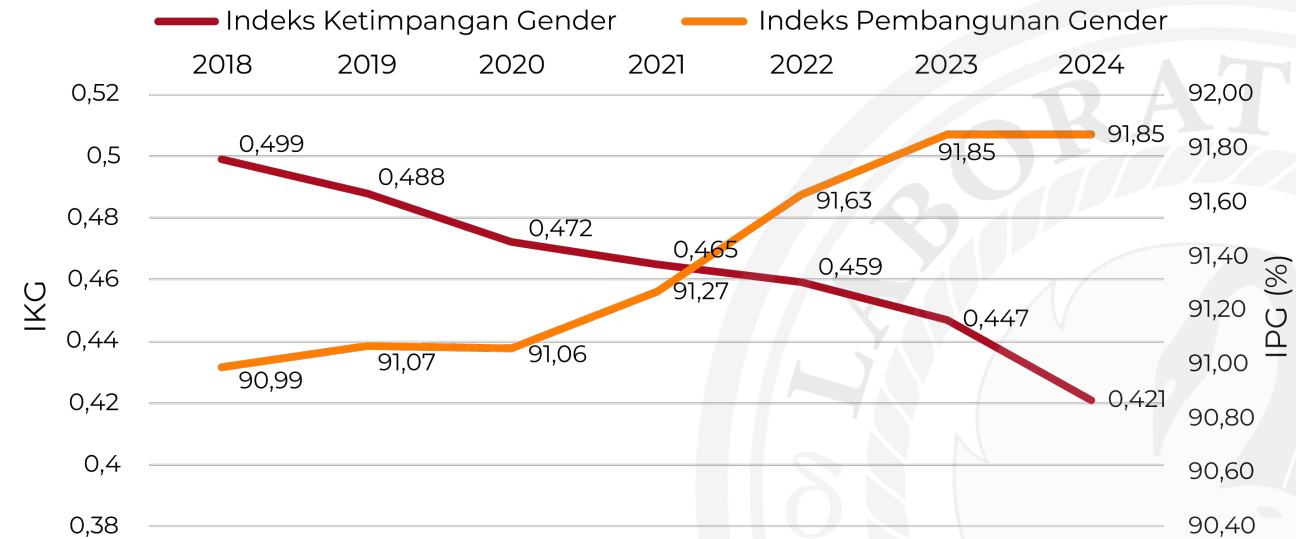


Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti dari *V-Dem Institute*.

Penggambaran pemberdayaan perempuan di Indonesia sejak 1945 menunjukkan tren positif yang ditunjukkan melalui penurunan skor dari tahun ke tahun, terutama signifikan pada tahun 1999 (sesaat setelah Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden), dari nilai 0,696 di tahun 1997 menjadi 0,421 di tahun 1999.

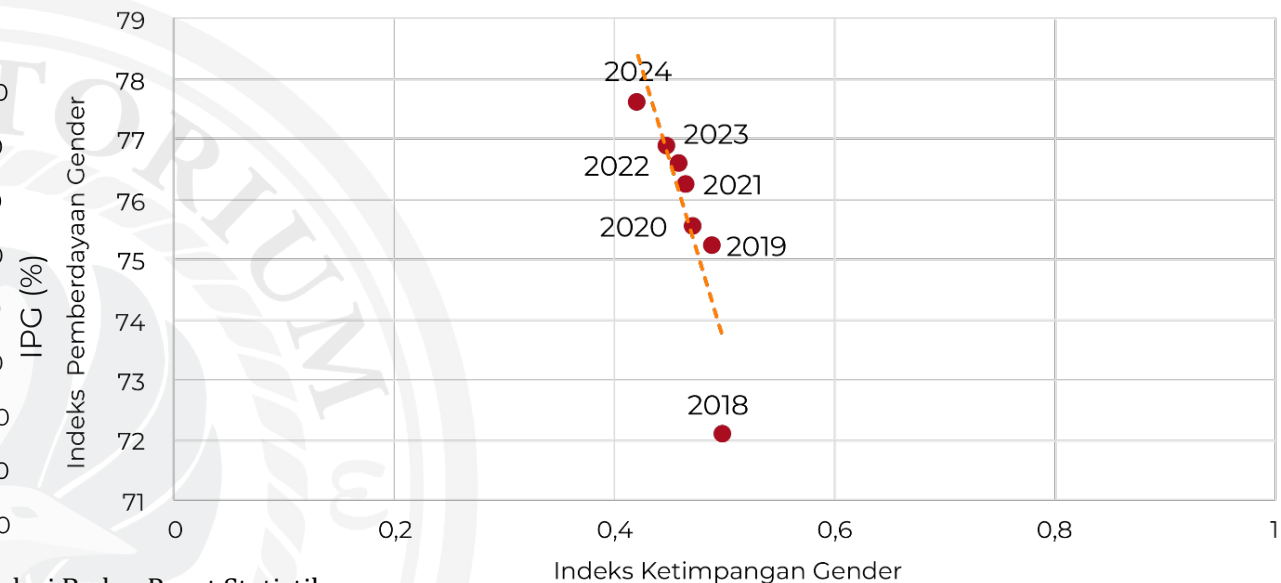
Progresi Pemberdayaan Perempuan melalui Lensa Indikator Nasional

Komparasi Tren IKG dan IPG Indonesia



Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik.

Hasil Tabulasi Silang antara IKG dan IDG Indonesia

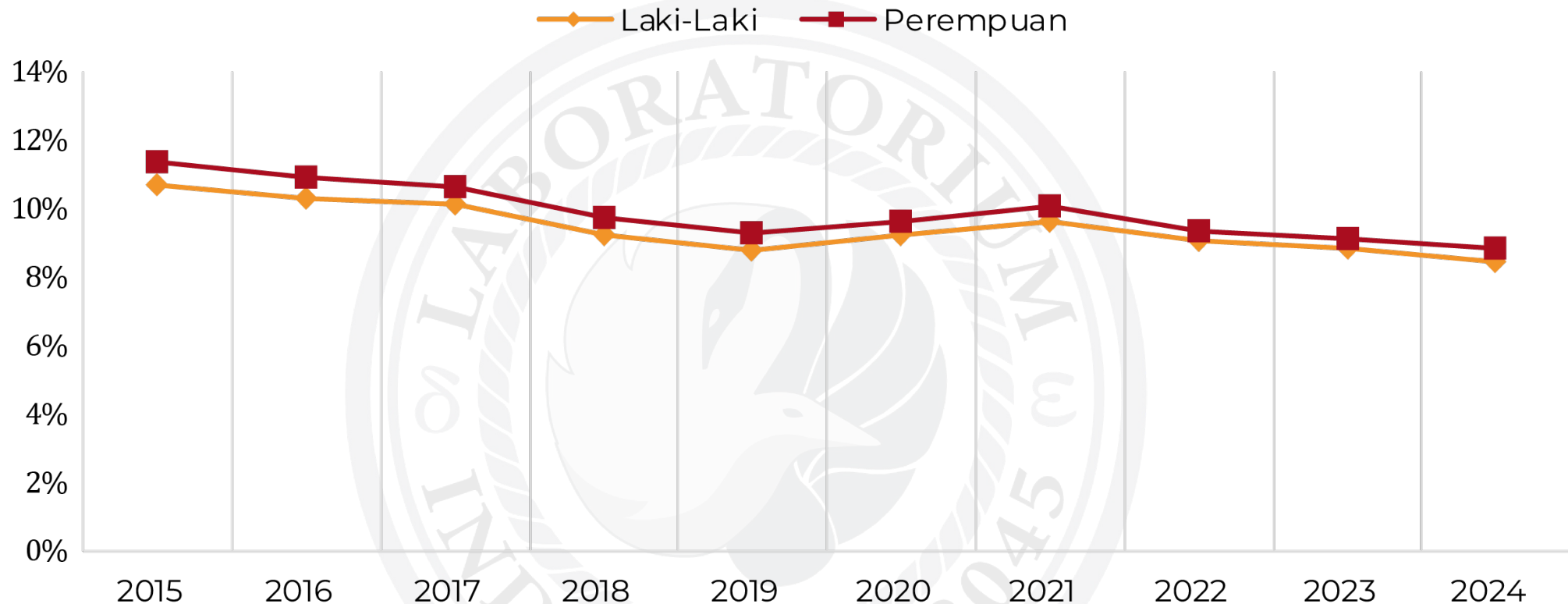


Komparasi antara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan adanya tren perbaikan yang konsisten selama periode 2018–2024. IKG menurun dari 0,499 pada 2018 menjadi 0,421 pada 2024, menandakan berkurangnya ketimpangan gender di Indonesia. Sebaliknya, IPG mengalami peningkatan dari 90,99% pada 2018 menjadi 91,85% pada 2024, mencerminkan kemajuan dalam pemerataan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Hasil tabulasi silang antara IKG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan bahwa perbaikan IKG berkorelasi dengan peningkatan IDG, di mana nilai IDG meningkat signifikan pada periode yang sama. Meskipun demikian, pergerakan data dari 2018 hingga 2024 menunjukkan bahwa perbaikan tersebut berlangsung bertahap dan masih menyisakan tantangan untuk mencapai tingkat kesetaraan gender yang ideal.

Perempuan dalam Lanskap Ekonomi

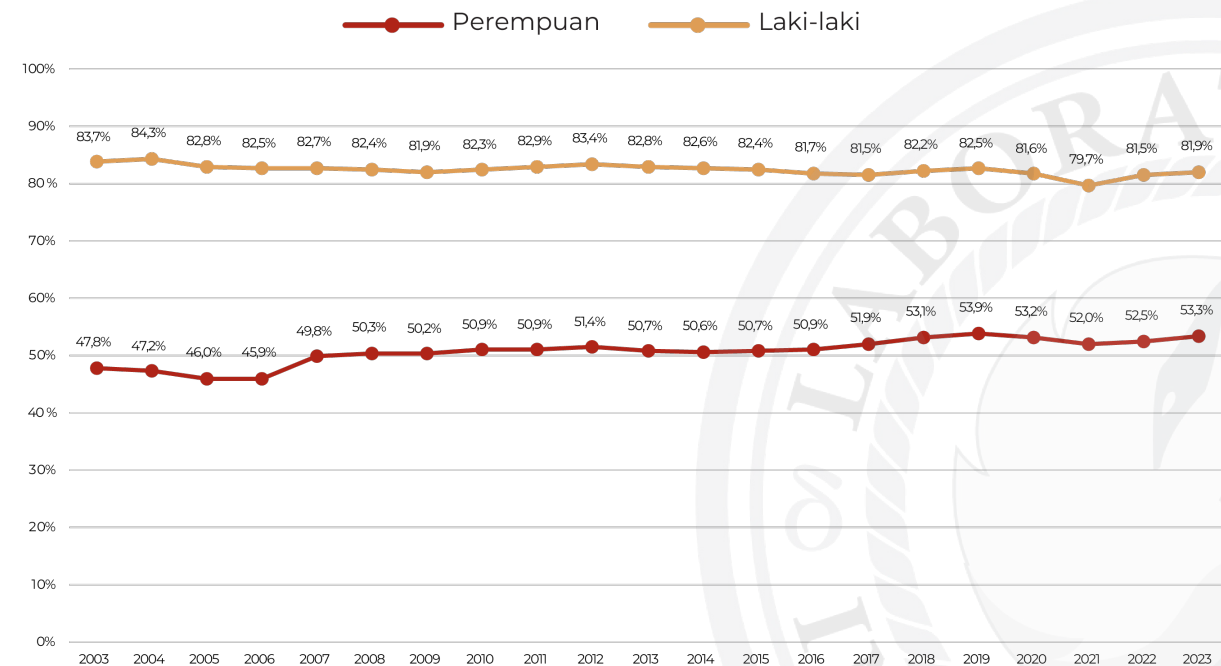
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional



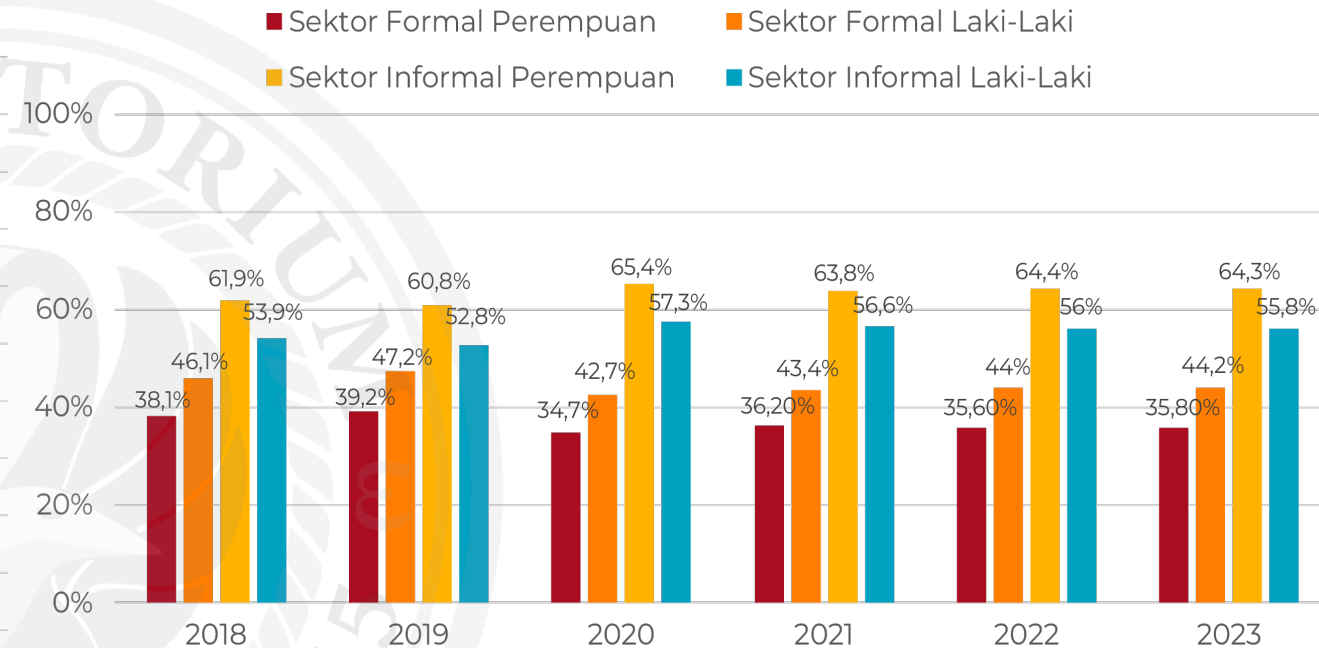
Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik.

Selama 10 tahun terakhir, angka kemiskinan perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Penurunan signifikan terjadi pada 2015–2019 karena stabilitas ekonomi dan meluasnya program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang banyak menysasar rumah tangga miskin dengan perempuan sebagai penerima manfaat utama. Kenaikan terjadi pada 2020–2021 akibat pandemi: perempuan kehilangan pekerjaan informal, terbebani kerja domestik, dan minim akses terhadap bantuan. Namun, angka kembali menurun hingga 2024 seiring pemulihan ekonomi, pelanggaran mobilitas, serta adaptasi perempuan ke sektor digital dan mikro usaha berbasis rumah tangga. Meski demikian, perempuan tetap lebih rentan—pada 2024, 9,1% perempuan masih miskin, dibandingkan 8,8% laki-laki.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia



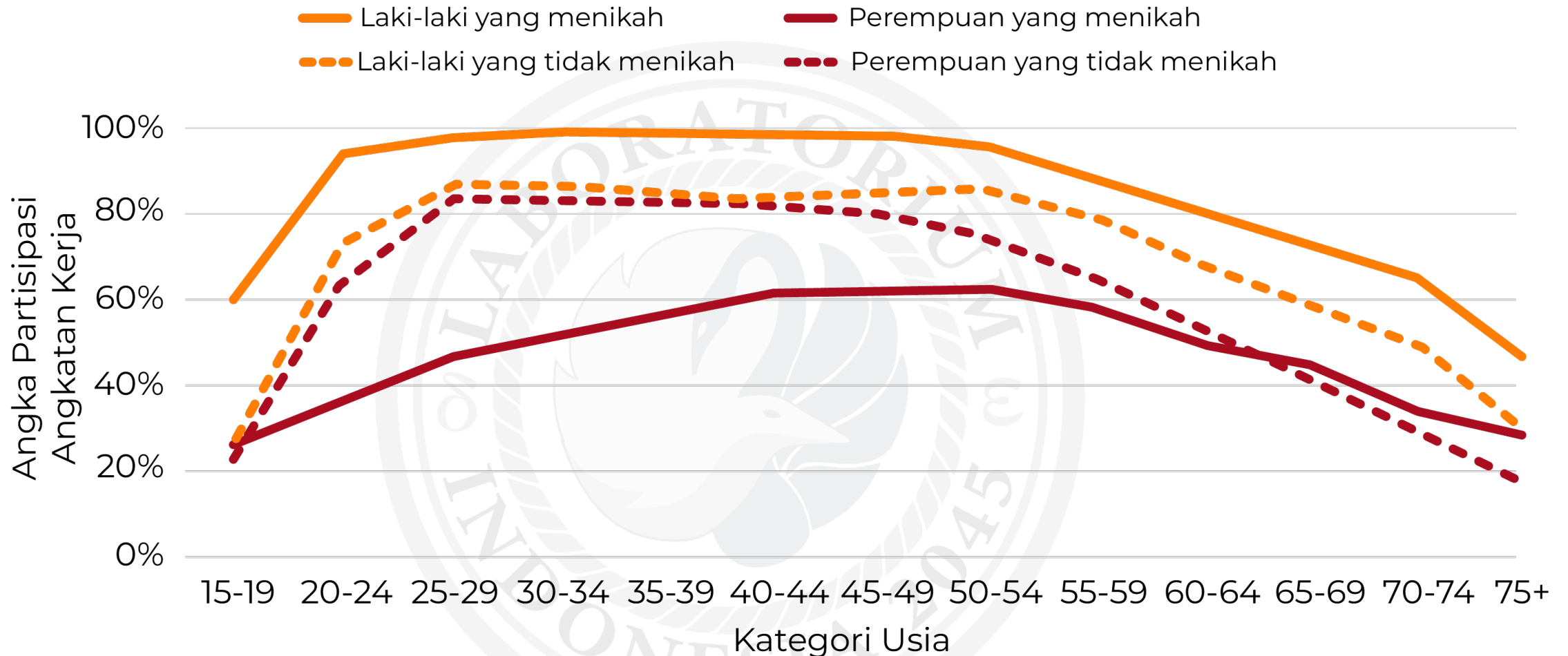
Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Indonesia



Sumber: Olahan Tim Peneliti dari *International Labour Organization* dan Badan Pusat Statistik.

Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2023, **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** laki-laki mencapai 82%, jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang hanya mencapai 53%. Meskipun begitu, partisipasi perempuan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama dua dekade terakhir. Jika dilihat dari proporsi jenis pekerjaan, tenaga kerja perempuan lebih banyak terserap di sektor informal, sementara persentase laki-laki yang bekerja di sektor formal masih lebih banyak dari Angkatan Kerja perempuan. Data ini tentunya bukan menjadi temuan yang baik. Sejalan dengan kondisi pekerja informal yang sarat akan minimnya perlindungan kerja dan standar upah yang tidak menentu, sehingga menyebabkan kelompok perempuan menjadi lebih rentan terhadap disrupti ekonomi yang berlangsung.

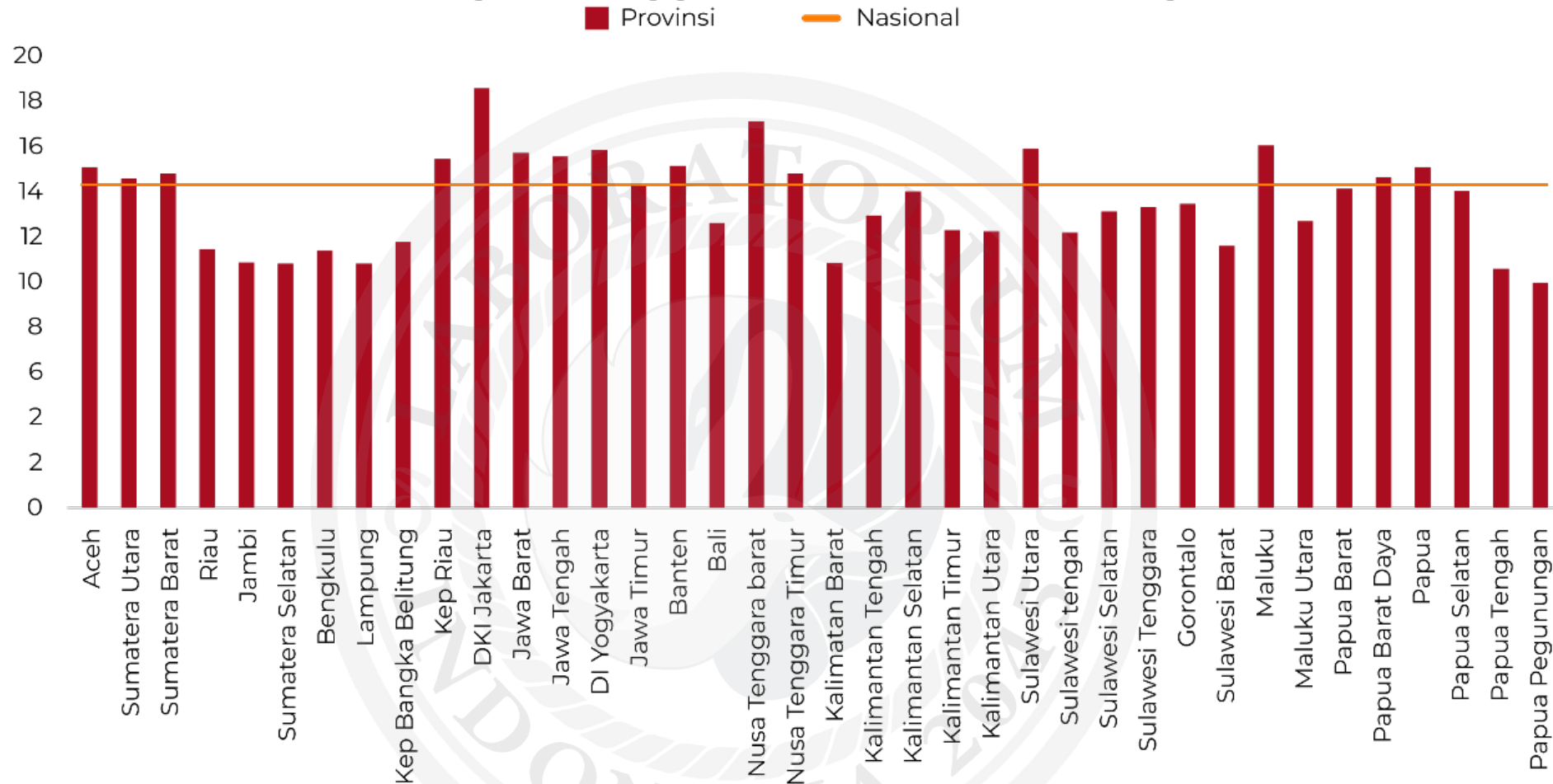
Partisipasi Angkatan Kerja (LFP) di Indonesia berdasarkan Status Perkawinan dan Usia



Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Bank Dunia (2024).

Data menunjukkan penurunan signifikan partisipasi angkatan kerja perempuan menikah pada usia 25–44 tahun, periode yang menjadi titik kritis dalam siklus hidup perempuan. Pada fase ini, beban kerja domestik yang tidak diupah dan sering tidak diakui bertabrakan dengan tuntutan kerja produktif. Norma gender dan ketimpangan struktural membatasi ruang gerak perempuan untuk mempertahankan atau mengembangkan karier, meskipun mereka memiliki akses terhadap pendidikan dan peluang kerja formal.

Perempuan sebagai Tonggak Ekonomi Keluarga di Indonesia

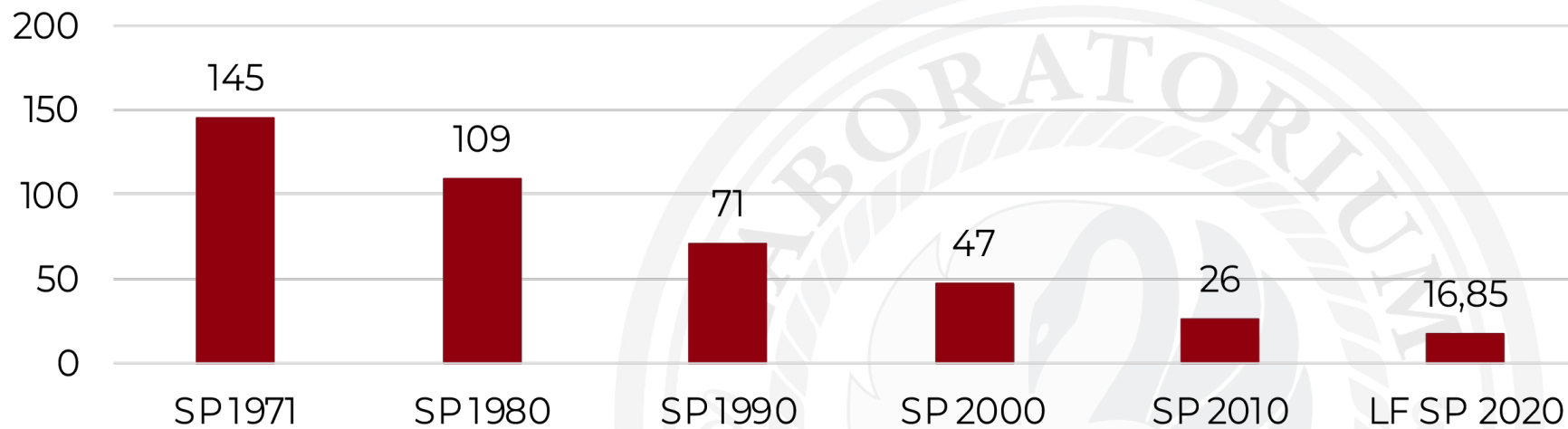


Sumber: Olahan Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik (2024).

Data Sakernas 2024 menunjukkan bahwa 15% pekerja di Indonesia adalah perempuan pencari nafkah utama (*female breadwinners*), dengan 40% total pekerja adalah perempuan. Mayoritas dari mereka (61%) bekerja di sektor usaha perorangan, menandakan dominasi sektor informal. Secara geografis, provinsi seperti DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku tercatat sebagai provinsi-provinsi yang memiliki persentase tertinggi *female breadwinners*, sementara sebagian besar daerah masih berada di bawah rata-rata nasional. Temuan ini menegaskan peran strategis perempuan dalam menopang ekonomi keluarga, meski banyak yang bekerja tanpa perlindungan formal. Kebijakan ekonomi yang responsif gender sangat dibutuhkan untuk mendukung mereka.

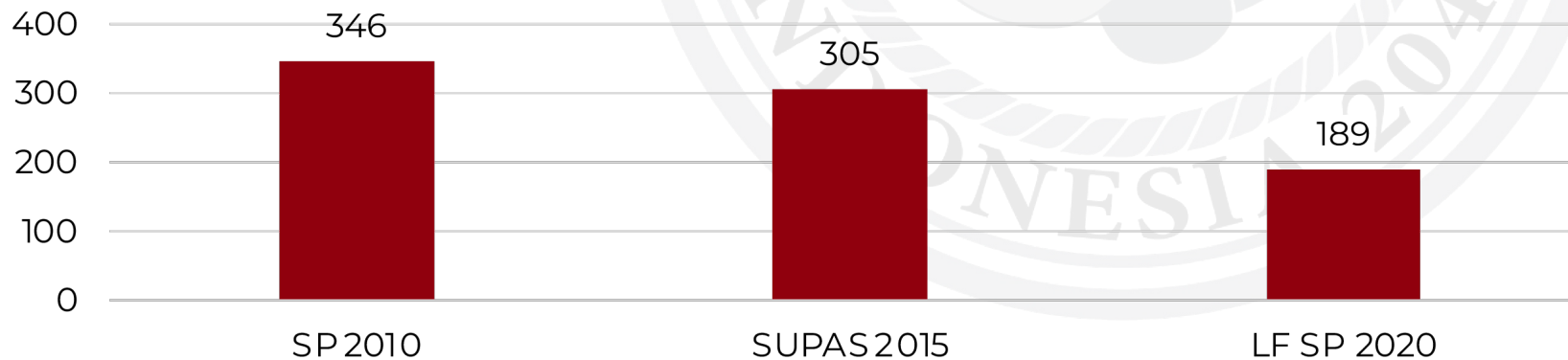
Perempuan, Kesehatan, dan Keselamatan Hidup

Rasio AKB per 1.000 Kelahiran Hidup di Indonesia (1971–2020)



Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik.

Rasio AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Indonesia (2010–2020)

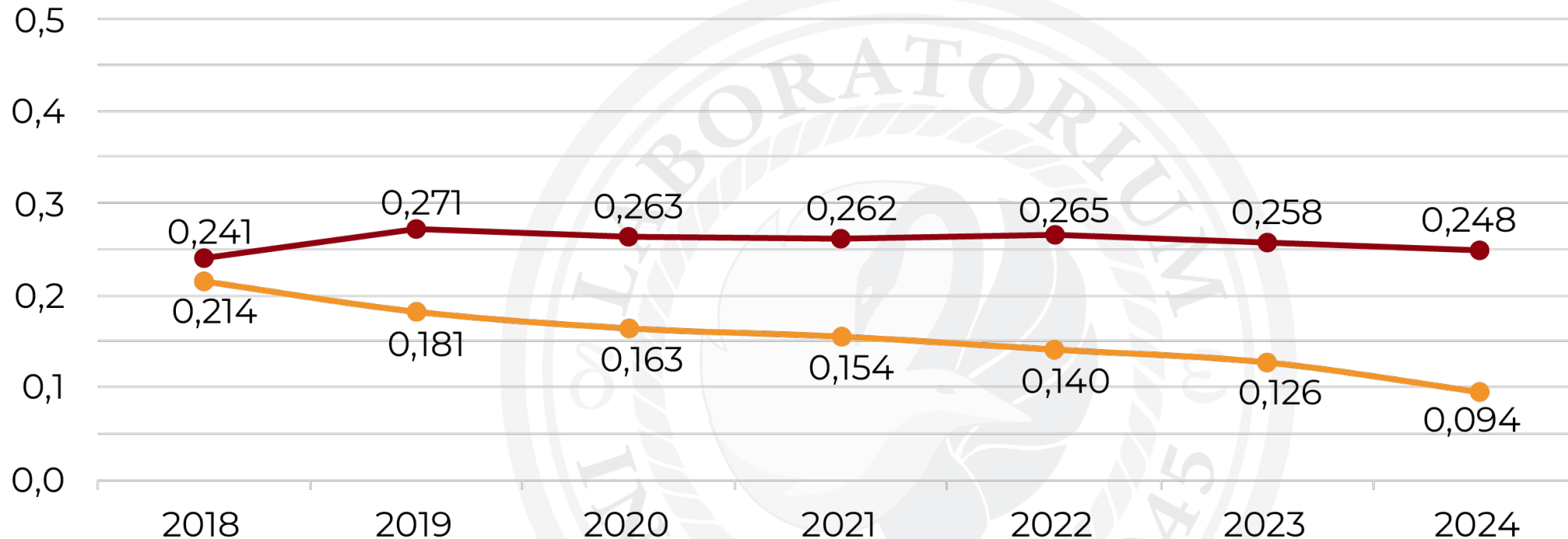


Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik.

Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) konsisten menurun berdasarkan data dari Sensus Penduduk per 10 tahun, begitu juga dengan rasio Angka Kematian Ibu (AKI). Berbeda dengan tren penurunan jangka panjang yang ditunjukkan oleh Sensus Penduduk, data dari *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) menunjukkan adanya peningkatan jumlah kematian ibu dan bayi pada tahun 2022 hingga 2023, dengan kematian bayi naik dari 20.882 menjadi 29.945 dan kematian ibu dari 4.005 menjadi 4.129. Penyebab utama kematian ibu pada periode ini adalah eklampsia, yang berkontribusi sebesar 23% pada 2022 dan meningkat menjadi 24% pada 2023, serta perdarahan, yang menyumbang 20% pada 2022 dan naik menjadi 23% pada 2023. Sementara itu, kematian bayi banyak disebabkan oleh bayi berat lahir rendah (BBLR) atau prematur dan asfiksia. Sosialisasi kesehatan, terutama sejak awal kehamilan, menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian ibu karena penyebab utama tersebut masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi di Indonesia

—●— MTF —●— MHPK20



Keterangan:

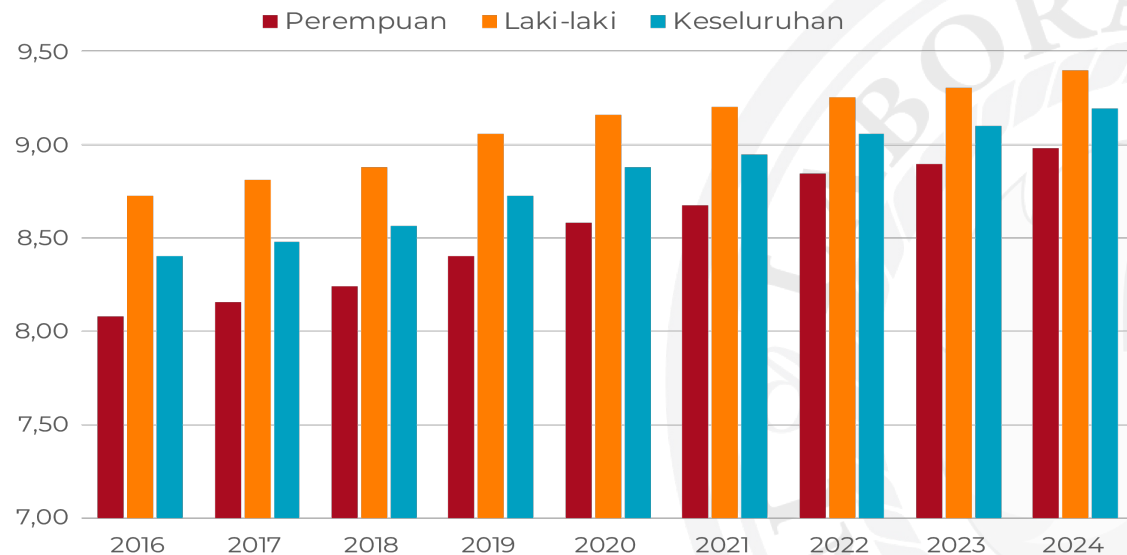
- MTF: Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di Fasilitas Kesehatan
- MHPK20: Proporsi perempuan Indonesia berusia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia di bawah 20 tahun

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik.

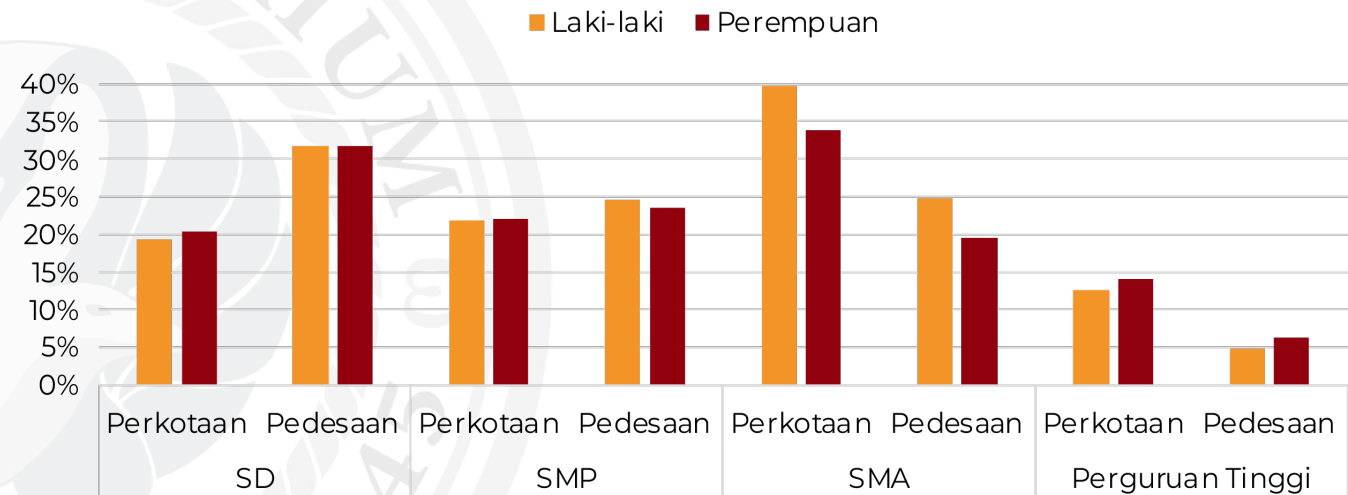
Proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan (MTF) terus menurun sejak 2018. Sementara itu, angka perempuan yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun (MHPK20) cenderung stabil dan hanya sedikit menurun. Ini menunjukkan bahwa meskipun akses ke fasilitas kesehatan membaik, kehamilan remaja masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kehamilan di usia muda sering kali diiringi dengan keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan ekonomi yang belum stabil. Ini bisa menghambat usaha pemerintah dalam perbaikan akses kesehatan.

Pendidikan Perempuan sebagai Jalan Keluar Ketimpangan

Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia



Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2024



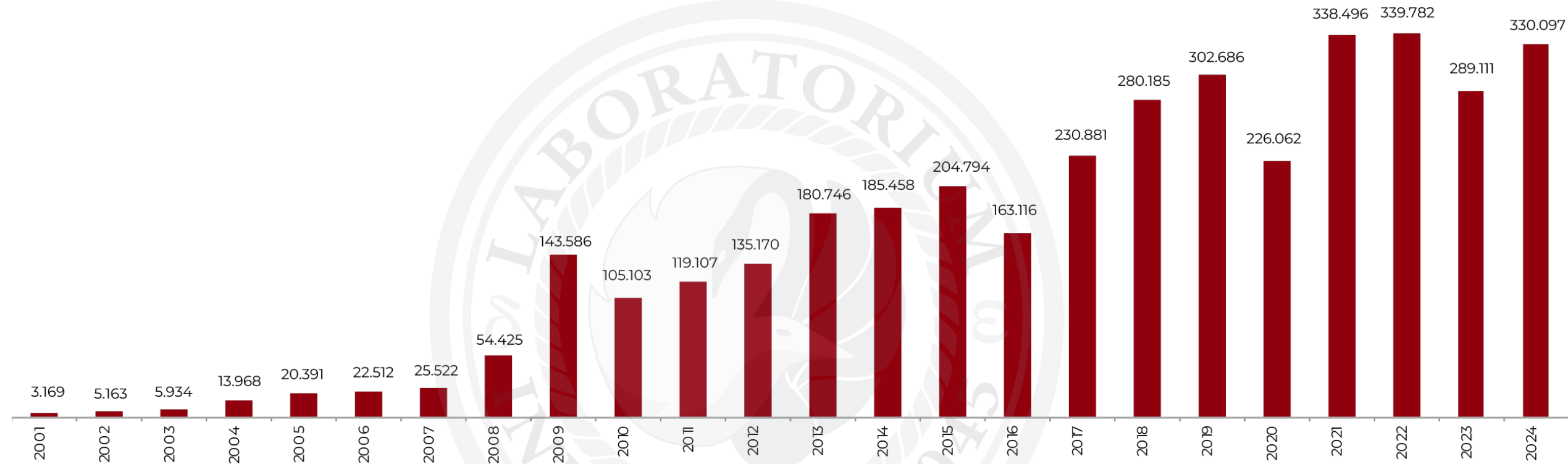
Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti dari Badan Pusat Statistik.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan seberapa jauh peserta didik menjalani tingkatan pendidikan formal. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin tinggi pula tingkatan pendidikan yang dicapai oleh peserta didik. Dari data ini menunjukkan bahwa RLS perempuan masih mengalami ketimpangan dengan laki-laki meskipun setiap tahun mengalami progres.

Sedangkan pada data kepemilikan ijazah perempuan dan laki-laki sudah cukup menunjukkan minimnya ketimpangan. Meski di tingkatan tertentu (SMA) dan tempat tinggal (perempuan pedesaan) memperlihatkan perbedaan di antara tingkatan lain. Kepemilikan ijazah oleh perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perlu mengingat bahwa data ini juga penting didukung oleh data kualitatif yang menunjukkan persoalan yang mengakar dari setiap pengalaman perempuan yang beragam.

Ruang Kosong dalam Indikator Pengukuran

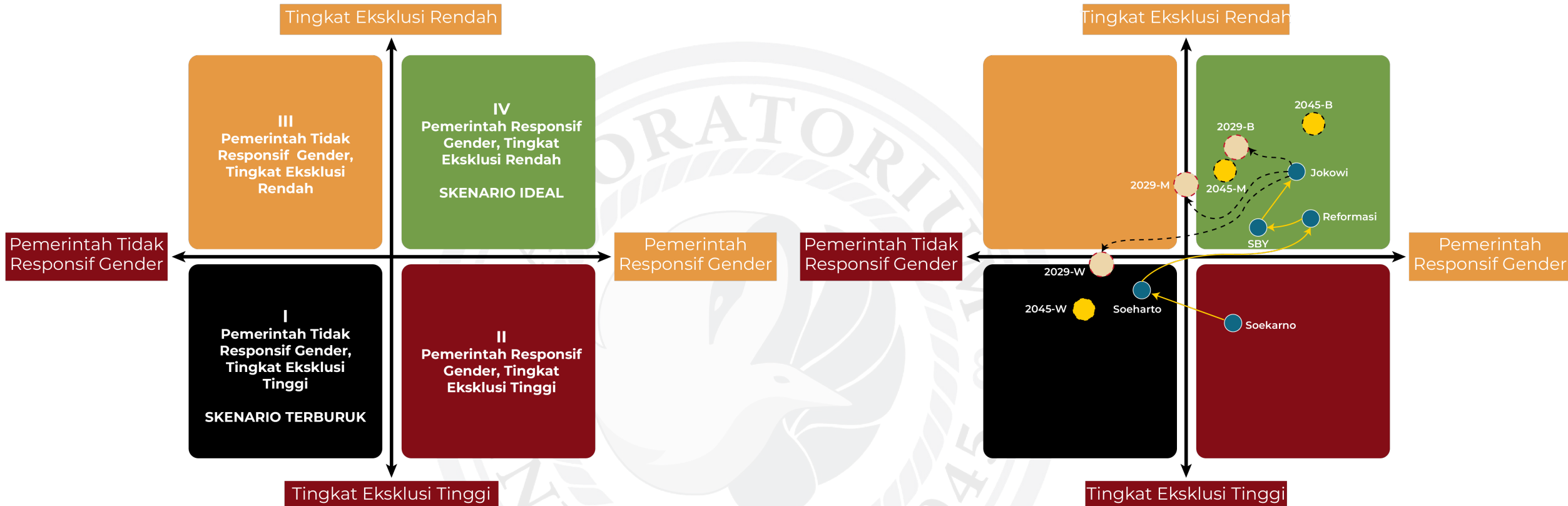
Jumlah Pengaduan KBG terhadap Perempuan di Indonesia



Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan.

Pada laporan Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Komnas Perempuan, bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43%), psikis (26,94%), fisik (26,78%), dan ekonomi (9,84%). CATAHU 2024 juga mencatat bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah kelompok paling rentan kekerasan fisik, ekonomi, hingga seksual. Ironinya, RUU PPRT (sudah diperjuangkan lebih dari 20 tahun) belum kunjung disahkan oleh pemerintah. Selain itu, Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) juga menjadi korban yang mengalami eksploitasi, pengekangan, kekerasan seksual di luar negeri. Artinya, angka partisipasi kerja perempuan tidak mencerminkan pemberdayaan bila kondisi kerja mereka penuh kekerasan, diskriminasi upah, dan tanpa perlindungan hukum. Perlindungan hukum seharusnya juga diarahkan oleh pemerintah kepada hak kesehatan reproduksi yang tidak terlalu tampak dalam IKG. IKG menggunakan angka kematian ibu sebagai representasi hak kesehatan reproduksi, tetapi CATAHU 2024 menunjukkan akses layanan kesehatan seksual yang ramah korban, layanan aborsi aman bagi korban pemerkosaan, dan penghentian pemaksaan perkawinan anak akibat kehamilan, belum terpenuhi.

Skenario Pemenuhan Kesetaraan Gender di Indonesia



- **Skenario terbaik 2029 (2029-B):** EGI turun ke angka 0,250; IKG turun ke 0,394 dari 0,447 di tahun 2024; Program MBG dan RBI berdampak nyata.
- **Skenario terburuk 2029 (2029-W):** Implementasi RPJMN V gagal; EGI naik ke atas 0,4; Pemotongan anggaran pemberdayaan perempuan terus terjadi tanpa adanya perhitungan dampak gender; MBG menjadi proyek politis tanpa dampak nyata; RUU PPRT tetap mangkrak; Kasus KBG terhadap perempuan meningkat.
- **Skenario terbaik 2045 (2045-B):** GEDSI menjadi fondasi demokrasi substantif; Pemerintah menata ulang arsitektur sosial-politik dan ekonomi, mengakui setiap kerja perempuan, termasuk kerja perawatan; EGI turun ke bawah 0,200; IKG turun dari 0,425 ke 0,15 di 2045; PRT dan migran perempuan mendapatkan perlindungan hukum; Kasus KBG—*offline* dan *online*—diminimalisasi.
- **Skenario terburuk 2045 (2045-W):** EGI naik ke atas 0,5; Regresi demokrasi; Pemerintah tidak toleran terhadap kritik; Kasus KBG meningkat; IKG memburuk karena kebijakan pemberdayaan perempuan, seperti RUU PPRT, belum disahkan.

Rekomendasi Strategis

**Pemerintah
disarankan
untuk**

Mengubah pendekatan pengarusutamaan gender menjadi transformasional dengan menjadikan GEDSI sebagai kerangka lintas sektor dan wilayah

Memperluas representasi perempuan dalam politik secara bermakna

Mereformasi anggaran negara agar responsif gender

Memperkuat data terpilah dan indikator kontekstual

Mereformasi pendidikan agar inklusif dan berperspektif gender

Memprioritaskan pencegahan dan perlindungan dari kekerasan

Memperkuat kemitraan strategis dengan gerakan perempuan dan komunitas lokal



TERIMA KASIH